

Bab III

Sidang Pertama BPUPKI

A. Latar Belakang Pembentukan BPUPKI

1. Kondisi Indonesia pada masa pendudukan Jepang

Secara historiografis, masa pendudukan Jepang di Indonesia (1942–1945) ditandai oleh eksploitasi sumber daya secara totaliter sekaligus penguatan kesadaran nasionalisme rakyat.

a. Eksploitasi Ekonomi dan Kemanusiaan

Pada masa pendudukan Jepang di Indonesia (1942–1945), pemerintah Jepang menerapkan kebijakan **mobilisasi total untuk kepentingan perang** (*Total-War Mobilisation*). Seluruh sumber daya yang tersedia di wilayah pendudukan diarahkan untuk mendukung kebutuhan militer Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Sumber daya alam seperti hasil pertanian, bahan tambang, dan berbagai komoditas strategis dikuasai dan dimanfaatkan untuk kepentingan Jepang.

Jepang menerapkan kebijakan perang total (*Total-War Mobilisation*) yang menguras sumber daya alam dan tenaga kerja (*Romusha*). Hal ini menyebabkan krisis ekonomi, kelaparan, dan penderitaan fisik bagi rakyat Indonesia (Sato, 1994; Ricklefs, 2008).

Selain mengeksploitasi sumber daya alam, Jepang juga melakukan pengerahan tenaga kerja secara besar-besaran melalui sistem **Romusha**. Rakyat Indonesia dipaksa bekerja dalam berbagai proyek pembangunan, seperti pembangunan jalan, jalur kereta api, lapangan terbang, benteng, dan fasilitas militer lainnya. Kondisi kerja yang berat, kekurangan makanan, minimnya fasilitas kesehatan, serta perlakuan yang tidak manusiawi menyebabkan banyak tenaga kerja mengalami penderitaan.

Kebijakan tersebut berdampak besar terhadap kehidupan masyarakat. Produksi dan distribusi bahan pangan terganggu, sementara sebagian besar hasil pertanian diserahkan untuk memenuhi kebutuhan perang. Akibatnya, masyarakat mengalami **kelangkaan bahan pangan, kemiskinan, penurunan taraf hidup, dan kelaparan**. Dengan demikian, pendudukan Jepang tidak hanya menimbulkan eksploitasi ekonomi, tetapi juga memberikan penderitaan kemanusiaan yang sangat berat bagi rakyat Indonesia.

b. Mobilisasi Massa dan Organisasi

Untuk menggalang dukungan perang, Jepang membubarkan organisasi pergerakan bentukan Belanda dan mendirikan organisasi baru seperti Jawa Hokokai serta badan militer/semi-militer seperti PETA, Heiho, dan Seinendan.

Kebijakan ini secara tidak langsung melatih kepemimpinan dan strategi militer para pemuda Indonesia (Benda, 1958).

Untuk mempertahankan kekuasaannya dan memperoleh dukungan masyarakat Indonesia dalam menghadapi Perang Dunia II, Jepang melakukan **mobilisasi massa melalui pembentukan berbagai organisasi sosial, politik, dan militer**. Organisasi-organisasi pergerakan yang sebelumnya dibentuk atau berkembang pada masa pemerintahan Belanda banyak yang dibubarkan dan digantikan dengan organisasi yang berada di bawah pengawasan pemerintah pendudukan Jepang.

Salah satu organisasi yang dibentuk adalah **Jawa Hokokai (Himpunan Kebaktian Jawa)** yang bertujuan mengarahkan masyarakat untuk memberikan dukungan terhadap kepentingan perang Jepang. Selain itu, Jepang membentuk berbagai organisasi semi-militer dan militer seperti **Seinendan** untuk pemuda, **Keibodan** sebagai organisasi pembantu kepolisian, serta **PETA (Pembela Tanah Air)** dan **Heiho** yang berkaitan dengan kepentingan pertahanan dan militer.

Meskipun pada awalnya organisasi-organisasi tersebut dibentuk untuk membantu kepentingan Jepang, keberadaannya memberikan pengalaman baru bagi masyarakat Indonesia, terutama dalam hal **kedisiplinan, organisasi, kepemimpinan, latihan militer, dan strategi pertahanan**. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, sebagian tokoh dan anggota organisasi tersebut kemudian memiliki peran dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Oleh karena itu, kebijakan mobilisasi Jepang memiliki dampak yang bersifat paradoks: di satu sisi digunakan untuk kepentingan perang Jepang, tetapi di sisi lain memberikan pengalaman organisasi dan militer yang kemudian dapat dimanfaatkan dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia

c. **Penggunaan Bahasa Indonesia**

Jepang melarang penggunaan bahasa Belanda dan mewajibkan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi administrasi dan pendidikan, yang mengakselerasi pembentukan identitas kebangsaan (Elson, 2008).

Salah satu kebijakan penting Jepang selama masa pendudukan adalah **pelarangan penggunaan bahasa Belanda dalam berbagai bidang kehidupan**, termasuk pemerintahan, pendidikan, dan komunikasi resmi. Kebijakan tersebut dilakukan karena bahasa Belanda dianggap sebagai simbol kekuasaan kolonial Belanda yang sebelumnya menguasai Indonesia.

Sebagai gantinya, **bahasa Indonesia memperoleh ruang penggunaan yang jauh lebih luas** dalam administrasi pemerintahan, pendidikan, komunikasi publik, dan berbagai kegiatan organisasi. Kondisi ini memberikan kesempatan bagi bahasa Indonesia untuk berkembang dan digunakan oleh masyarakat dari berbagai daerah.

Perluasan penggunaan bahasa Indonesia memiliki dampak penting terhadap perkembangan **identitas nasional**. Bahasa Indonesia semakin

berfungsi sebagai alat komunikasi yang dapat menjembatani perbedaan suku dan daerah. Masyarakat dari berbagai latar belakang semakin terbiasa menggunakan satu bahasa yang sama dalam berbagai kegiatan. Dengan demikian, meskipun kebijakan tersebut pada awalnya dilakukan Jepang untuk menghilangkan pengaruh Belanda, dalam perkembangannya kebijakan tersebut turut memperkuat **kesadaran kebangsaan dan identitas nasional Indonesia**.

2. Alasan Jepang membentuk BPUPKI

Pembentukan **BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia)** atau dalam bahasa Jepang dikenal sebagai *Dokuritu Junbi Cosakai* pada **29 April 1945** tidak dapat dilepaskan dari perkembangan Perang Dunia II, khususnya semakin terdesaknya posisi Jepang dalam **Perang Pasifik**. Pada awal pendudukannya, Jepang berusaha membangun citra sebagai pembebas bangsa-bangsa Asia dari kolonialisme Barat. Namun, memasuki tahun 1944, posisi militer Jepang semakin melemah sehingga pemerintah Jepang mulai mengambil berbagai langkah politik untuk mempertahankan pengaruhnya di Indonesia.

Pembentukan BPUPKI menjadi salah satu strategi politik Jepang untuk memperoleh dukungan rakyat Indonesia sekaligus mempersiapkan kemungkinan perubahan politik di wilayah pendudukan. Meskipun dibentuk oleh pemerintah pendudukan Jepang, keberadaan BPUPKI kemudian menjadi sangat penting karena memberikan ruang bagi tokoh-tokoh Indonesia untuk membahas dan merumuskan berbagai persoalan mendasar mengenai **dasar negara, konstitusi, wilayah, dan bentuk negara Indonesia yang akan merdeka**.

a. Posisi Militer yang Terdesak

Sejak pertengahan tahun 1944, garis pertahanan Jepang di Pasifik mulai runtuh akibat gempuran Sekutu. Kondisi ini memicu krisis politik di Tokyo yang berujung pada jatuhnya Kabinet PM Hideki Tojo dan digantikan oleh PM Kuniaki Koiso (Ricklefs, 2008).

Sejak pertengahan tahun **1944**, kedudukan militer Jepang dalam Perang Pasifik semakin melemah. Pasukan Sekutu berhasil merebut sejumlah wilayah strategis yang sebelumnya dikuasai Jepang. Perkembangan tersebut menyebabkan garis pertahanan Jepang di kawasan Pasifik semakin terdesak dan ancaman kekalahan Jepang semakin nyata.

Kondisi militer yang memburuk juga menimbulkan dampak politik di dalam pemerintahan Jepang. Perdana Menteri **Hideki Tojo**, yang sebelumnya memimpin pemerintahan sekaligus menjadi salah satu tokoh penting dalam kebijakan perang Jepang, akhirnya mengundurkan diri pada Juli 1944. Ia

kemudian digantikan oleh **Jenderal Kuniaki Koiso** sebagai Perdana Menteri Jepang.

Pergantian pemerintahan tersebut menunjukkan bahwa Jepang mulai menyadari pentingnya memperoleh dukungan dari wilayah-wilayah pendudukannya, termasuk Indonesia. Dalam kondisi perang yang semakin sulit, Jepang tidak hanya mengandalkan kekuatan militer, tetapi juga mulai menggunakan pendekatan politik untuk mempertahankan pengaruhnya. Salah satu bentuk pendekatan tersebut adalah memberikan harapan mengenai masa depan politik Indonesia.

b. **Realisasi Janji Koiso**

Pada 7 September 1944, PM Koiso mengumumkan di depan Parlemen Jepang (*Teikoku Gikai*) janji kemerdekaan bagi Hindia Timur (Indonesia). Pembentukan BPUPKI merupakan langkah konkret Jepang untuk merealisasikan janji tersebut (Poesponegoro & Notosusanto, 2008).

Upaya Jepang untuk mendapatkan dukungan rakyat Indonesia semakin terlihat ketika **Perdana Menteri Kuniaki Koiso pada 7 September 1944 mengumumkan janji mengenai pemberian kemerdekaan kepada Indonesia di kemudian hari**. Pernyataan tersebut disampaikan dalam sidang parlemen Jepang (*Teikoku Gikai*) dan kemudian dikenal sebagai **Janji Koiso**.

Janji tersebut memiliki tujuan politik yang kuat. Jepang berharap masyarakat Indonesia akan tetap memberikan dukungan dan membantu kepentingan Jepang dalam menghadapi Sekutu. Namun, janji tersebut juga menciptakan peluang bagi tokoh-tokoh nasional Indonesia untuk semakin aktif mempersiapkan masa depan bangsa.

Sebagai salah satu tindak lanjut dari kebijakan tersebut, Jepang membentuk **BPUPKI pada 29 April 1945**, bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito. Badan ini diberi tugas untuk melakukan penyelidikan mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan persiapan kemerdekaan Indonesia. Dalam perkembangannya, BPUPKI menjadi forum penting bagi para tokoh Indonesia untuk menyampaikan gagasan tentang **dasar negara dan kehidupan bernegara**.

Dengan demikian, meskipun pembentukan BPUPKI pada awalnya merupakan bagian dari strategi politik Jepang, badan tersebut kemudian dimanfaatkan oleh para tokoh Indonesia untuk membicarakan dan merumuskan dasar-dasar bagi negara Indonesia yang merdeka.

c. **Mencegah Pemberontakan Internal:** Dengan memberi harapan kemerdekaan, Jepang bertujuan menarik simpati rakyat Indonesia agar tetap mau bekerjasama

dan tidak melakukan pemberontakan di saat posisi militer Jepang melemah (Elson, 2008).

3. Tujuan pembentukan BPUPKI

Tujuan pembentukan BPUPKI ditinjau dari dua sudut pandang:

Pembentukan BPUPKI memiliki latar belakang dan kepentingan yang berbeda jika dilihat dari perspektif pemerintah Jepang dan bangsa Indonesia. Bagi Jepang, BPUPKI merupakan bagian dari strategi politik dan militer untuk mempertahankan kekuasaannya di Indonesia ketika posisi Jepang dalam Perang Pasifik semakin terdesak. Sementara itu, bagi bangsa Indonesia, keberadaan BPUPKI menjadi kesempatan penting untuk membahas dan mempersiapkan berbagai aspek yang diperlukan bagi terbentuknya negara Indonesia yang merdeka.

a. **Berdasarkan Kepentingan Jepang (Strategis)**

Menggalang bantuan logistik dan tenaga dari rakyat Indonesia untuk menghadapi Sekutu serta mempertahankan stabilitas keamanan di wilayah pendudukan (Benda, 1958).

Dari sudut pandang Jepang, pembentukan BPUPKI merupakan salah satu langkah strategis untuk mempertahankan dukungan rakyat Indonesia terhadap pemerintahan pendudukan. Jepang membutuhkan bantuan berupa **tenaga manusia, bahan pangan, dan berbagai sumber daya lainnya** untuk mendukung kepentingan perang dalam menghadapi Sekutu. Selain itu, Jepang juga berkepentingan menjaga stabilitas keamanan di wilayah Indonesia agar tidak terjadi perlawanan yang dapat semakin melemahkan posisi mereka.

Dengan memberikan ruang kepada tokoh-tokoh Indonesia untuk membicarakan persiapan kemerdekaan, Jepang berharap dapat memperoleh simpati dan mempertahankan kerja sama masyarakat. Dengan demikian, pembentukan BPUPKI pada awalnya bukan semata-mata merupakan bentuk pemberian kebebasan politik kepada bangsa Indonesia, melainkan juga bagian dari strategi Jepang untuk **memobilisasi dukungan rakyat dan mempertahankan stabilitas wilayah pendudukan**.

b. **Berdasarkan Kepentingan Indonesia (Substansial)**

BPUPKI bertugas merumuskan dan mengkaji hal-hal mendasar terkait tata pemerintahan, politik, ekonomi, serta menyusun Dasar Negara (Pancasila) dan Rancangan Undang-Undang Dasar sebagai syarat berdirinya negara merdeka (Kurosawa, 1993; Poesponegoro & Notosusanto, 2008).

Dari perspektif bangsa Indonesia, BPUPKI memiliki arti yang jauh lebih penting dan substansial. BPUPKI menjadi forum bagi para tokoh nasional untuk membahas berbagai persoalan mendasar yang diperlukan dalam pembentukan sebuah negara merdeka. Pembahasan tidak hanya berkaitan dengan

pemerintahan dan politik, tetapi juga mencakup persoalan ekonomi, wilayah, kewarganegaraan, konstitusi, serta hubungan antara negara dan masyarakat.

Salah satu hasil terpenting dari proses pembahasan dalam BPUPKI adalah **perumusan dasar negara Indonesia**. Dalam rangkaian sidang BPUPKI, para tokoh nasional menyampaikan gagasan mengenai dasar negara yang kemudian berkembang menjadi rumusan **Pancasila**. Selain itu, BPUPKI juga membahas rancangan Undang-Undang Dasar sebagai landasan hukum bagi negara Indonesia yang akan dibentuk.

Dengan demikian, bagi bangsa Indonesia, BPUPKI bukan sekadar lembaga bentukan pemerintah pendudukan Jepang, tetapi menjadi **sarana strategis untuk mempersiapkan fondasi negara Indonesia merdeka**. Forum tersebut memberikan kesempatan kepada para pemimpin Indonesia untuk menyatukan berbagai gagasan dan merumuskan prinsip-prinsip dasar kehidupan bernegara sebelum Proklamasi Kemerdekaan (Kurosawa, 1993; Poesponegoro & Notosusanto, 2008).

B. Pembentukan dan Keanggotaan BPUPKI

BPUPKI (*Dokuritu Junbi Cosakai*) diumumkan pembentukannya pada 1 Maret 1945 oleh Panglima Tentara Ke-16 Jepang, Letnan Jenderal Kumakichi Harada, dan resmi dilantik pada 29 April 1945 di Gedung Chuuou Sangi-In, Jakarta (Poesponegoro & Notosusanto, 2008).

BPUPKI beranggotakan 67 orang yang terdiri dari 60 tokoh pergerakan nasional Indonesia (seperti Ir. Soekarno, Drs. Mohammad Hatta, Mr. Soepomo, Mr. Muhammad Yamin) dan 7 anggota wakil dari pihak Jepang yang hadir tanpa hak suara (Kaelan, 2013).

Peran Dr. Radjiman Wedyodiningrat Ditunjuk sebagai Ketua (*Kaichou*), dibantu oleh Ichibangase Yosio (Wakil Ketua dari Jepang) dan Raden Pandji Soeroso. Dr. Radjiman berperan sebagai moderator netral yang memimpin jalannya sidang dan memicu lahirnya rumusan dasar negara melalui pertanyaan utamanya saat pembukaan sidang: "*Apa dasar negara Indonesia yang akan kita bentukan?*" (Latif, 2011).

C. Pelaksanaan Sidang Pertama BPUPKI

Sidang Pertama berlangsung selama empat hari, mulai dari 29 Mei hingga 1 Juni 1945 (Sekretariat Negara RI, 1995). Dilaksanakan di Gedung Chuuou Sangi-In (sekarang Gedung Pancasila / Kementerian Luar Negeri) di Jalan Lapangan Banteng, Jakarta (Poesponegoro & Notosusanto, 2008). Membahas serta merumuskan dasar filosofis (*Philosophische Grondslag*) dan pandangan hidup bangsa (*Weltanschauung*) bagi negara Indonesia merdeka (Latif, 2011).

D. Pembahasan Dasar Negara Indonesia

Mohammad Yamin (29 Mei 1945): Mengusulkan lima asas dasar negara: (1) Peri Kebangsaan, (2) Peri Kemanusiaan, (3) Peri Ketuhanan, (4) Peri Kerakyatan, dan (5) Kesejahteraan Rakyat (Yamin, 1959).

Soepomo (31 Mei 1945): Mengajukan teori *Negara Integralistik* (persatuan) yang menekankan keharmonisan antara negara dan rakyatnya, dengan lima prinsip: (1) Persatuan, (2) Kekeluargaan, (3) Keseimbangan lahir dan batin, (4) Musyawarah, dan (5) Keadilan rakyat (Anshory, 2008).

Soekarno (1 Juni 1945): Menyampaikan pidato mendasar yang mengusulkan lima prinsip secara terstruktur sebagai dasar negara merdeka (Latif, 2011).

E. Pidato Soekarno tentang Dasar Negara

Pada 1 Juni 1945, Soekarno memaparkan lima prinsip dasar negara (*Philosophische Grondslag*):

1. **Kebangsaan Indonesia:** Nasionalisme yang bersifat inklusif, menyatukan seluruh suku dan pulau dalam satu tanah air Indonesia (Soekarno, 1945/2001).
2. **Internasionalisme / Perikemanusiaan:** Nasionalisme yang tidak sempit (*chauvinisme*), melainkan menjunjung tinggi kemanusiaan universal dan persaudaraan antarbangsa (Latif, 2011).
3. **Mufakat / Demokrasi:** Prinsip permusyawaratan yang menjamin bahwa keputusan negara diambil melalui perwakilan dan dialog (Kaelan, 2013).
4. **Kesejahteraan Sosial:** Prinsip keadilan sosial di mana negara bertanggung jawab memastikan tidak ada kemiskinan dan terjadinya keadilan ekonomi (Soekarno, 1945/2001).
5. **Ketuhanan yang Maha Esa:** Prinsip keagamaan yang berkebudayaan, di mana setiap warga negara dapat beribadah sesuai keyakinannya dengan saling menghormati (Latif, 2011).

F. Lahirnya Istilah Pancasila

Secara etimologis berakar dari bahasa Sanskerta; *Panca* berarti lima dan *Sila* berarti alas, dasar, atau aturan tingkah laku yang penting (Kaelan, 2013). Soekarno menyatakan bahwa nama "Pancasila" diperoleh atas saran dari seorang ahli bahasa. Ia juga menjelaskan bahwa jika lima prinsip tersebut diperas, akan menjadi **Trisila** (Socio-nationalisme, Socio-demokratie, dan Ketuhanan), dan jika diperas lagi menjadi **Ekasila** (Gotong Royong) (Soekarno, 1945/2001). Berkedudukan sebagai *Philosophische Grondslag* (pondasi filsafat) dan *Weltanschauung* (pandangan hidup bangsa) yang melandasi seluruh hukum dan cita-cita bernegara (Latif, 2011).

G. Hasil Sidang Pertama BPUPKI

Terdapat berbagai usulan yang beragam terkait dasar negara, baik dari golongan nasionalis netral-agama maupun golongan Islam (Anshory, 2008). Hingga sidang

berakhir pada 1 Juni 1945, BPUPKI belum mencapai kesepakatan final mengenai teks rumusan dasar negara secara rinci (Sekretariat Negara RI, 1995). Sebelum reses, dibentuk Panitia Sembilan (diketuai oleh Soekarno) untuk menampung, menyelaraskan, dan merumuskan kembali gagasan-gagasan dasar negara dari para anggota BPUPKI. Hasil dari panitia ini melahirkan **Rancangan Mukaddimah / Piagam Jakarta** pada 22 Juni 1945 (Latif, 2011; Poesponegoro & Notosusanto, 2008).

H. Nilai-Nilai Keteladanan dalam Sidang BPUPKI

Mengedepankan integrasi nasional di atas perbedaan daerah, suku, dan golongan (Kaelan, 2013). Mengutamakan dialog rasional dan terbuka dalam menyelesaikan perbedaan (Anshory, 2008). Para pendiri bangsa menunjukkan sikap toleran dan kedewasaan politik saat memperdebatkan paham kebangsaan dan keagamaan (Latif, 2011).

Kerelaan berkompromi demi melahirkan kesepakatan bersama untuk Indonesia merdeka (Poesponegoro & Notosusanto, 2008).

Daftar Pustaka

- Anshory, R. M. (2008). *Pancasila dan perdebatan di BPUPKI*. LKiS.
- Benda, H. J. (1958). *The crescent and the rising sun: Indonesian Islam under the Japanese occupation 1942–1945*. W. van Hoeve.
- Elson, R. E. (2008). *The idea of Indonesia: A history*. Cambridge University Press.
- Kaelan. (2013). *Pendidikan Pancasila* (Ed. ke-10). Paradigma.
- Kurosawa, S. (1993). *Pembentukan BPUPKI dan perumusan UUD 1945*. Gramedia Pustaka Utama.
- Latif, Y. (2011). *Matahari pembaharuan: Hermeneutika Pancasila*. Gramedia Pustaka Utama.
- Poesponegoro, M. D., & Notosusanto, N. (2008). *Sejarah nasional Indonesia Jilid VI: Zaman Jepang dan zaman Republik Indonesia*. Balai Pustaka.
- Ricklefs, M. C. (2008). *A history of modern Indonesia since c. 1200* (4th ed.). Stanford University Press.
- Sato, S. (1994). *War, nationalism and peasants: Java under the Japanese occupation, 1942–1945*. M. E. Sharpe.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. (1995). *Risalah sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI)–Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), 28 Mei 1945–22 Agustus 1945*. Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Soekarno. (2001). *Lahirnya Pancasila: Pidato Soekarno di hadapan BPUPKI 1 Juni 1945*. Media Pressindo. (Karya asli diterbitkan 1945).

Yamin, M. (1959). *Naskah persiapan Undang-Undang Dasar 1945* (Jilid 1). Yayasan Prapantja.